

ABSTRACT

STUDY OF TEACHERS UNDERSTANDING AGAINST FOUR PILLARS NATIONALITY CONCEPT BASED ON 2013 CURRICULUM

(Sonia Elisya Febriana, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

This research aims to analyze and know the teachers understanding against four pillars of nationality concept in civics lesson based on 2013 curriculum in SMP Negeri 1 Bandar Lampung year 2014. This research uses descriptive method. This research population are all teachers of Civics lesson at SMP Negeri 1 Bandar Lampung. The result of this research shows: teachers understanding against four pillars of nationality concept (X), with indicators of teacher's ability to explain the concept, teacher's ability to actualize the concept, teacher's ability to classify the concepts into value and comprehension test with indicator (Y) Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika that included in the category of understanding as much as 2 respondents or 50% of the 4 respondents.

Key words : four pillars of nationality, teacher, understanding

ABSTRAK

STUDI TENTANG PEMAHAMAN GURU TERHADAP KONSEP EMPAT PILAR KEBANGSAAN PADA KURIKULUM 2013

(Sonia Elisya Febriana, Berchah Pitoewas, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam mata pelajaran PPKN pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru PPKN SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan (X), dengan indikatornya kemampuan guru menjelaskan konsep, kemampuan guru memfaktualisasikan konsep, kemampuan mengklarifikasikan konsep menjadi nilai, serta test pemahaman dengan indikator (Y) Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, yaitu termasuk dalam kategori memahami sebanyak 2 responden atau 50% dari 4 responden.

Kata kunci : empat pilar kebangsaan, guru, pemahaman

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total pulau mencapai 17.508 pulau. Terdiri dari lima kepulauan besar dan 30 kelompok kepulauan kecil, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 yang tidak berpenghuni. Indonesia pula memiliki suku bangsa yang terbanyak di dunia, terdapat lebih dari 740 suku bangsa atau etnis.

Beragamnya suku bangsa Indonesia inilah mendorong seorang Taufik Kiemas mencetuskan penguatan karakter bangsa yaitu empat pilar kebangsaan, hal ini dilandasi atas keprihatinan semakin lunturnya kepribadian dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia seolah-olah menjadi bangsa yang lupa terhadap nilai-nilai yang dulu diperjuangkan para pendiri bangsa. Gejolak sosial terjadi di banyak daerah. Kekerasan, pemaksaan kehendak, dan anarkisme menjadi headline berita media. Kasus korupsi semakin mewabah dan seolah menjadi budaya.

Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa Indonesia yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pilar yang berupa sistem keyakinan suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Agar nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan ini tidak pudar dan dapat diimplementasikan kepada masyarakat maka dibutuhkannya pendidikan empat pilar kebangsaan ini melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan ini memperkuat karakter bangsa dimana warga negara dituntut lebih mandiri, tanggung jawab dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi empat pilar. Dengan demikian, bangsa ini akan mengenal, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan tersebut, antara lain: nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pluraritas Persatuan dan Kesatuan, dalam semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai tersebut juga akan menjadi landasan idil kehidupan bersama.

Pada kurikulum 2013 konsep empat pilar kebangsaan ini lebih ditekankan dalam Mata Pelajaran PPKN. Nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar ini harus menjadi prioritas dalam membekali aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Karena empat pilar kebangsaan sebagai wahana bagi pembentukan generasi penerus kepemimpinan bangsa dan mampu meneruskan dan menerapkan langkah-langkah strategis dalam

menanamkan karakter luhur, Karakter luhur itu lah yang menjadi jati diri bangsa dalam proses pendidikan yang selama ini di jalani, dengan demikian tercipta generasi muda, para pelajar yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai penerus bangsa di masa mendatang.

Pada kurikulum 2013 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dirancang untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki moral, etika, sikap dan prilaku sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sehingga dapat berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Perbedaan penerapan konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum lama dan kurikulum 2013 terdapat pada materi yang diajarkan dimana pada kurikulum lama konsep empat pilar kebangsaan ini Materi yang disajikan berdasarkan empat pilar dengan pembahasan yang terpisah-pisah sedangkan di kurikulum 2013 Materi disajikan tidak berdasarkan pada pengelompokkan menurut empat pilar kebangsaan tetapi berdasarkan keterpaduan empat pilar dalam pembentukan karakter bangsa.

Penelitian ini terfokus pada pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam mata pelajaran PPKN pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013-2014 karena banyaknya guru yang kurang paham dengan adanya implementasi keterpaduan konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013.

Berdasarkan keadaan yang peneliti lihat di lapangan pada saat melaksanakan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 di Bandar Lampung, terdapat banyak guru Mata Pelajaran PPKN yang kurang paham terhadap keterpaduan konsep empat pilar kebangsaan yang terdapat pada kurikulum 2013. Sehingga apa yang diinginkan pada kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKN tidak dapat diimplementasikan dengan baik kepada peserta didiknya.

Secara umum, pemahaman merupakan proses pengetahuan seseorang dalam mencari makna atau memahami suatu hal yang belum diketahui oleh dirinya yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, pencapaian tingkat pemahaman seseorang akan berbeda pula sesuai dengan tingkat pengetahuan seseorang.

Pemahaman Guru merupakan cara guru untuk mengetahui dan memahami pembelajaran serta faktor pendukungnya. Menurut Ella Yulaelawati (2004:60) "Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami materi/bahan. Proses pemahaman terjadi karena adanya kemampuan menjabarkan suatu materi/bahan ke materi/bahan lain".

Menurut Daryanto (2008:106) :

Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Guru dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

Menurut Kusnandar (2009:54) “Guru adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar falsafah negara ataupun sebagai ideologi negara. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.

Landasan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea IV yaitu sebagai berikut:

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara-ratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Menurut Kaelan (2012:45) bahwa pengertian kata “....Dengan berdasarkan kepada....” hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara. Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercantum kata “Pancasila” secara eksplisit namun anak kalimat”....dengan berdasarkan kepada....” ini memiliki makna dasar adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah “Pancasila”.

Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disingkat UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD NRI Tahun 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan berbagai undang-undang yang menjadi derivatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa negara adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sehingga jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Pengertian Indonesia sebagai negara kesatuan dijelaskan oleh Kaelan dalam pendapatnya berikut ini:

negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia. (2012:197).

Hakikat negara kesatuan dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Empu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kata *bhinna ika*, kemudian dirangkai menjadi satu kata *bhinneka*. Pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal 36a UUD NRI Tahun 1945.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengacu pada bahasa Sanskrit, hampir sama dengan semboyan *e Pluribus Unum*, semboyan Bangsa Amerika Serikat yang maknanya *diversity in unity*, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah Empu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh Empu Tantular lebih dahulu.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian kurikulum ini sangat fundamental dan menggambarkan posisi sesungguhnya kurikulum dalam suatu proses pendidikan. Dalam sejarah kurikulum Indonesia telah berulang kali melakukan penggantian kurikulum seperti :

1. Tahun 1947-Leer Plan (Rencana Pelajaran),
2. Tahun 1952-Rencana Pelajaran Terurai,
3. Tahun 1964-Rentjana Pendidikan,
4. Tahun 1968-Kurikulum 1968,
5. Tahun 1975-Kurikulum 1975,
6. Tahun 1984-Kurikulum 1984,
7. Tahun 1994 dan 1999-Kurikulum 1994
8. Tahun 2004-Kurikulum Berbasis Kompetensi,
9. Tahun 2006-Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,
10. Tahun 2013-Kurikulum 2013.

Usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Pengembangan Kurikulum 2013 dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud dengan melibatkan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu dan praktisi pendidikan. Kedua, pemaparan desain Kurikulum 2013 di depan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pendidikan yang telah dilaksanakan pada 13 November 2012 serta di depan Komisi X DPR RI pada 22 November 2012. Ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu cara yang ditempuh selain melalui saluran on-line, juga melalui media massa cetak. Tahap keempat, dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Kurikulum 2013.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam mata pelajaran PPKN pada kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014

Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan kurikulum 2006. Menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya Tujuan Pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.

Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut:

Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengorganisasikan SK-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan kewarganegaraan; (2) sikap kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan; (4) keteguhan kewarganegaraan; (5) komitmen kewarganegaraan; dan (6) kompetensi kewarganegaraan. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual

Penelitian ini menggunakan penelitian populasi adalah seluruh guru mata pelajaran PPKN pada SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang berjumlah “4” orang.

Dalam penelitian ini menggunakan suatu analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka secara sistematis, selanjutnya menggunakan rumus Interval kemudian untuk mengetahui tingkat persentase menggunakan rumus Persentase

$$I = \frac{NT - NR}{K} \quad \text{dan} \quad P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah peneliti melakukan penelitian, kemudian peneliti menganalisis data yang diperoleh maka peneliti akan mencoba menggambarkan dan menjelaskan keadaan atau kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai Studi Tentang Pemahaman Guru Terhadap Konsep Empat Pilar Kebangsaan Dalam Mata Pelajaran PPKN Pada Kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa dari 4 responden penelitian studi tentang pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam mata pelajaran PPKN pada kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan Guru menjelaskan Konsep

Berdasarkan hasil pengolahan data bisa diketahui bahwa 2 orang atau 50% termasuk dalam kategori memahami maksudnya guru memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan konsep-konsep empat pilar kebangsaan dalam kurikulum 2013 dimana guru dapat menjawab angket dengan baik, karena pemahaman konsep empat pilar dalam kurikulum 2013 ini sangat dibutuhkan untuk guru memperkokoh karakter peserta didik yang dituntut menjadi lebih mandiri, tanggung jawab dan mampu menghadapi era globalisasi melalui penguatan konsep dalam empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013 inilah.

1 orang atau 25% termasuk kategori cukup memahami maksudnya adalah mereka berpendapat bahwa responden atau guru mampu menjelaskan konsep empat pilar kebangsaan namun kemampuan menjelaskan konsep empat pilar kebangsaan dalam kurikulum 2013 kurang baik hal ini dikarenakan kurangnya keseriusan guru dalam mengikuti forum MGMP dan seminar yang membahas tentang konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013 sehingga apa yang diharapkan pada kurikulum 2013 ini tidak terlalu dapat di pahami oleh guru tersebut.

1 orang atau 25% termasuk kategori tidak memahami maksudnya guru tersebut kurang mampu untuk menjelaskan konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013, karena guru tersebut kurang mengikuti seminar-seminar tentang kurikulum 2013

2. Kemampuan Memfaktualisasikan Konsep

Berdasarkan hasil pengolahan data bisa diketahui bahwa 3 orang atau 75% termasuk dalam kategori memahami maksudnya guru memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan konsep empat pilar kebangsaan lalu memfaktualisasikannya, sehingga guru tersebut dapat :

- 1) Sebagai acuan guru untuk melihat kemampuan peserta didik dalam menganalisis fakta-fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep yang ada dalam empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013
- 2) Sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan pembentukan karakter generasi penerus kepemimpinan bangsa dan menanamkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
- 3) Sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran

Sedangkan, 2 orang atau 50% termasuk kategori cukup memahami dilihat dari cukup memahaminya guru dalam memfaktualisasikan konsep empat pilar kebangsaan. Walaupun masih ada sebagian konsep yang belum bisa difaktualisasikan oleh guru tersebut.

3. Kemampuan Guru Mengklarifikasikan Konsep Menjadi Nilai

Berdasarkan analisis data bisa diketahui bahwa 3 orang atau 75% termasuk dalam kategori memahami maksudnya mereka memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengolah konsep empat pilar kebangsaan menjadi sebuah nilai-nilai yang sangat penting untuk peserta didik hidup berbangsa dan bernegara. Dengan nilai-nilai empat pilar ini lah guru dapat memperkokoh karakter bangsa terutama peserta didik untuk dituntut menjadi manusia yang lebih mandiri, tanggung jawab dan mampu menghadapi era globalisasi melalui transmisi empat pilar kebangsaan dalam kurikulum 2013. Guru mampu mengklarifikasikan sebuah konsep menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan karena nilai-nilai inilah yang menjadi prioritas dalam membekali aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Pada kurikulum 2013 inilah peserta didik ditekankan memiliki moral, etika, sikap dan perilaku sebagaimana diarahkan oleh filsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sedangkan 1 orang atau 25% termasuk kedalam kategori cukup memahami maksudnya mereka memiliki cukup kemampuan untuk mengklarifikasikan konsep empat pilar kebangsaan menjadi nilai dalam kurikulum 2013 namun masih terdapat sedikit kekeliruan guru dalam mengklarifikasikan sebuah konsep menjadi nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada peserta didik.

4. Test Pemahaman Guru

Berdasarkan analisis data bisa diketahui bahwa 1 orang atau 25% termasuk dalam kategori memahami dimana guru dapat menjawab hampir keseluruhan pertanyaan dengan benar, sedangkan 3 orang guru atau 75% termasuk dalam kategori cukup memahami, dimana guru tersebut dapat menjawab sebagian pertanyaan dengan baik dan benar

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum Studi tentang pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam mata pelajaran PPKN pada kurikulum 2013 yang mengukur pemahaman guru terhadap konsep empat pilar kebangsaan (X), Dengan indikatornya kemampuan guru menjelaskan konsep, kemampuan guru memfaktualisasikan konsep, kemampuan mengklarifikasikan konsep menjadi nilai, test Pemahaman, dengan indikator (Y) Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, yaitu termasuk dalam kategori memahami sebanyak 2 responden atau 50% dari 4 responden.

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

Kepada kepala sekolah hendaknya ikut berperan aktif dalam memperhatikan pelaksanaan proses pembelajaran khususnya dalam konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013. Dengan cara memberikan petunjuk teknis (juknis) yang jelas dan baku tentang konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2013

Kepada pada guru atau pendidik untuk lebih aktif dalam forum MGMP mata pelajaran sejenis, diklat, seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk lebih memudahkan guru dalam penyampaian konsep empat pilar kebangsaan pada kurikulum 2011

DAFTAR RUJUKAN

Daryanto. 2008. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta

Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta : Paradigma

Kusnandar. 2009. *Guru Profesional Implementasi KTSP Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum Dan Pembelajaran (Filosofi Teori Dan Aplikasi)*. Bandung : Pakar Raya